

TRANSFORMASI STRUKTUR PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN

Abbas Effendi*

Abstract

There are three points to discuss in this paper. The first is to observe influences of economic-structures transformation on rural society's prosperity. The second is to analyze impacts of production-factors transformation on traditional economic agents. The third is to scrutinize institutional factors' role on prosperity of rural economic structures.

In this paper, rural economic structures can be classified into three groups. They are agricultural, non-agricultural and combination of the two. The result shows that (1) transformation of economic structure has positive impact on family's prosperity in rural area. The non-agricultural activities tend to stimulate the creation of the prosperity of rural society than the agricultural ones do. (2) Capital and education are very determining factors to improve rural society's prosperity. In the structures of economic combination and non-agricultural, technology also has significant role in increasing society's prosperity. On institutional role, it is known that KUD (Village Unit Cooperation) in its manifestation has not functioned well as to increase farmers' prosperity.

Pembangunan dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama Indonesia telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi (rata-rata 7 persen per tahun). Akan tetapi, dalam waktu yang sama muncul permasalahan tentang ketimpangan distribusi manfaat pembangunan, baik antarsektor ekonomi, antarpelaku ekonomi, maupun antarwilayah, terutama desa-kota (*Kajian Ekonomi Rakyat*, 1996).

Sindrom para pelaku ekonomi terhadap suatu teori *laizzez faire* dari Smith yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal serta membiarkan kepincangan telah memberikan andil besar atas terjadinya ketimpangan tersebut. Sebab, menurut konsep ini pertumbuhan dan akumulasi modal tidak akan terjadi tanpa membiarkan kepincangan (Landreth, 1976: 43).

* Drs. Abbas Effendi, M.Si. adalah staf peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan staf pengajar pada Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Kebijakan transformasi struktur perekonomian yang cenderung membiarkan ketimpangan, seperti tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, berakibat pada aktivitas pasar tenaga kerja. Hal ini tercermin dari makin meningkatnya pengangguran, pesatnya pertumbuhan sektor informal, dan perbedaan tingkat upah yang makin mencolok antara desa-kota (Manning, 1980).

Ketimpangan upah di kedua lokasi tersebut cenderung berpengaruh langsung terhadap pembagian pendapatan (*income distribution*), yang pemulihannya tidak hanya ditentukan semata-mata dari faktor-faktor produksi yang mempengaruhi penghasilan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kedudukannya di pasar tenaga kerja (*labor market*) yang diperlukan intervensi secara kelembagaan (Mazumdar, 1981 dan 1993).

Ketimpangan distribusi pendapatan antardesa dan kota, selain berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa, juga dapat mempengaruhi produktivitas masyarakat. Tinggi rendahnya produktivitas masyarakat, termasuk kelas pekerja, ditentukan oleh sumber daya ekonomi yang dikuasai, seperti tenaga kerja, modal, dan *human capital* (Sudibyo, 1995). Ekonomi di perkotaan, terutama sektor industri, cenderung lebih menguasai modal dan *human capital* yang lebih berorientasi pada kebijakan padat modal, sedangkan ekonomi di pedesaan lebih berorientasi pada padat karya dan sangat tergantung pada produktivitas tenaga kerja.

Di lain pihak, kualitas faktor produksi yang disebut terakhir tersebut relatif rendah dan cenderung memiliki produktivitas rendah. Dengan demikian, didapat gambaran bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di pedesaan juga berada pada tahap rendah. Hal ini lebih diperburuk lagi oleh berbagai kebijakan dari lembaga-lembaga dan munculnya kelas-kelas ekonomi yang mendorong ketimpangan distribusi pendapatan di pedesaan dan tidak mendukung pengentasan kemiskinan. Akibatnya, penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan sangat lambat. Contohnya, jumlah penduduk miskin di pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta turun sebanyak 4,05 persen selama periode 1990-1993. Di Jawa Tengah penurunannya lebih lambat lagi, yakni hanya 0,73 persen dalam periode yang sama (Kasto dan Sembiring, 1996; Sukamdi, 1996).

Bila hal ini tidak segera diantisipasi dan tidak dilakukan kebijakan yang tepat, bukan hanya aktivitas-aktivitas ekonomi tradisional yang akan punah, melainkan juga tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan akan semakin terdesak pada titik yang paling rawan. Solusinya adalah diperlukan informasi yang jelas tentang "Dampak Transformasi Struktur Perekonomian terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan".

Inventarisasi data-data yang berkaitan dengan topik di atas ditentukan dan bersumber dari beberapa desa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (Bangunjiwo, Tamantirto, dan Patalan) dan Jawa Tengah (Bonyokan, Krajan, dan Kayumas). Desa-desa tersebut dikelompokkan dalam tiga kegiatan

ekonomi, yakni pertanian, kombinasi (pertanian dan nonpertanian), dan nonpertanian. Hal ini diungkapkan melalui permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

Permasalahan pertama adalah pengaruh transformasi struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan. Untuk menentukan transformasi struktur ekonomi diperlukan tiga kegiatan usaha utama, yakni keberadaan sektor pertanian, sektor kombinasi, dan sektor nonpertanian. Variabel kesejahteraan tercermin dalam bentuk variabel-variabel ekonomi dan nonekonomi yang dinikmati oleh para pelaku ekonomi.

Permasalahan kedua adalah peran tenaga kerja, modal, dan teknologi terhadap penghasilan para pelaku ekonomi tradisional. Faktor tenaga kerja diwakili oleh kualitas manusia, yang dijabarkan ke dalam variabel-variabel pendidikan dan umur. Faktor modal tercermin dalam penggunaan sejumlah uang, bangunan, tanah, kendaraan, dan variabel lain. Faktor teknologi dianalisis dari variabel-variabel mesin dan peralatan lain.

Permasalahan ketiga adalah peranan faktor kelembagaan yang dicerminkan dalam bentuk variabel regulasi dan informasi. Faktor regulasi dipecah menjadi dua, yakni regulasi ekstern dan intern. Regulasi pertama adalah peran kelembagaan yang meliputi variabel-variabel pola tanam PIR dan sapi perah. Regulasi kedua adalah berbagai kebijakan yang diambil oleh pelaku ekonomi, yang meliputi variabel-variabel akumulasi modal, perekrutan tenaga kerja, dan penggunaan peralatan.

Konsep Transformasi dan Kesejahteraan

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan transformasi ekonomi dan tingkat kesejahteraan sudah mulai diamati sejak dasawarsa 1950-an, yang diungkapkan bahwa sistem ekonomi selalu terdiri dari dua sektor dominan, yakni sektor pertanian dengan pola penghasilan yang bersifat subsisten dan sektor industri pengolahan yang sudah memiliki karakteristik remuneratif (Lewis, 1954, 1958). Selanjutnya, ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena transformasi tenaga kerja dari sektor subsisten ke sektor remuneratif kurang mulus. Hal ini disebabkan munculnya sektor modern yang sama sekali berbeda dengan kondisi dan cara-cara yang dilakukan tenaga kerja di sektor pertanian. Akibatnya adalah menimbulkan *booming* terhadap munculnya kegiatan ekonomi sektor informal, khususnya di perkotaan.

Kebijakan transformasi struktur perekonomian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus tercermin dalam bentuk pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas, maka aspek pembagian pendapatan (*income distribution*) merupakan komponen yang tidak dapat dibiarkan. Secara langsung atau tidak langsung pembagian pendapatan yang sangat timpang tidak saja berada pada sektor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan politik (Pareto, 1971: 281; Hatta, 1976: 39-60). Pada akhir Pelita I disinyalir oleh para ahli bahwa pertumbuhan ekonomi memang perlu,

tetapi belum memadai (Sundrum, 1973; Singarimbun dan Fenny, 1973).

Selain itu, terdapat hubungan yang bermakna antara tahapan pembangunan dan distribusi pendapatan (Kuznetz, 1955 dalam Prisma, 1980: 53). Untuk mengukur distribusi pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan, digunakan pembagian pendapatan personal. Pembagian pendapatan seperti ini tidak saja dapat dipakai untuk mengukur kelompok-kelompok pendapatan tinggi, sedang, dan rendah, tetapi juga dapat mengamati tingkat kepincangan menurut fungsional, regional, dan sektoral (Hasibuan, 1993: 7). Model pengukuran yang sering digunakan dalam menentukan struktur kesejahteraan adalah kurva Gini Lorenz Ratio.

Di samping diukur tingkat kesejahteraan secara makro, juga dihitung tingkat kesejahteraan secara mikro, yakni permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi dan kontribusinya terhadap pendapatan. Ricardo mengembangkan teori Adam Smith dengan lebih dimamis, yakni membagi tiga kelompok faktor produksi, modal, tenaga kerja, dan tuan tanah. Teori Neo Klasik menambah dengan faktor produksi teknologi.

$$Q = F(L, C, T)$$

Bila P dianggap harga barang, laba total yang diterima perusahaan adalah berikut ini.

$$\Pi = PQ - wL - iC - pT$$

Persamaan pendapatan dari upah dan bukan upah dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = Y_1 + w_l = p_1 \cdot q$$

Y_1 adalah bukan upah, w adalah upah, l adalah jumlah waktu yang dipilih untuk bekerja, q adalah barang i yang dibeli di pasar, dan p_1 adalah harga barang.

Dampak Transformasi Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan: Objektif dan Subjektif

Kebijakan transformasi struktur ekonomi di pedesaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kegiatan ekonomi, yaitu dari pertanian menuju ke kombinasi (pertanian dan nonpertanian) dan nonpertanian. Dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat pedesaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang melakukan kegiatan di nonpertanian cenderung lebih sejahtera daripada mereka yang melakukan kegiatan ekonomi di sektor kombinasi dan pertanian. Akan tetapi, dilihat dari sisi distribusi pendapatan terlihat hasil yang berlainan. Dampak transformasi struktur perekonomian terhadap kesejahteraan diperoleh hasil dari kesejahteraan objektif dan subjektif.

a. Tingkat Kesejahteraan (Objektif) Masyarakat Desa - Total Pendapatan

Variabel total pendapatan (Tabel 1) menunjukkan beberapa hasil analisis informasi data bahwa sebagian besar keluarga di pedesaan yang bekerja di pertanian memiliki tingkat pendapatan lebih rendah daripada keluarga yang bekerja pada sektor nonpertanian. Contohnya, di DIY rata-rata pendapatan di Desa Patalan (pertanian) sebanyak Rp65.715,00 per bulan atau

delapan kali lebih rendah dibandingkan dengan Desa Bangunjiwo (nonpertanian) (Rp528.484,00 per bulan). Hal yang sama juga terlihat di Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa perbedaan antara rata-rata pendapatan di kedua sektor tersebut adalah tujuh kali lipat, yakni masing-masing Rp81.800,00 dan Rp528.820,00 per bulan. Dengan demikian, mereka yang bekerja di sektor nonpertanian memiliki tingkat kesejahteraan tinggi daripada mereka yang bekerja di sektor kombinasi dan pertanian.

- Aset Ekonomi

Dari seluruh aset ekonomi yang diukur terlihat (Tabel 1) bahwa di

Yogyakarta terdapat perbedaan kekayaan rumah tangga yang mencolok antara mereka yang berada di sektor pertanian (Rp1.327.975,00) dengan rumah tangga nonpertanian (Rp11.755.280,00), yaitu hampir sembilan kali lipat. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan rumah tangga kombinasi (Rp2.006.480,00), perbedaan tersebut relatif lebih kecil yaitu enam kali. Hal ini juga terjadi di Jawa Tengah, yang menunjukkan aset ekonomi rumah tangga nonpertanian (Rp5.068.625,00) lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga pertanian (Rp4.026.565,00) atau kombinasi (Rp3.428.720,00). Bila aset ekonomi rumah tangga dibandingkan

Tabel 1
Kesejahteraan Keluarga menurut Desa Penelitian

Variabel	Desa Penelitian					
	Bangunjiwo	Tamantirto	Patalan	Bonyokan	Krajan	Kayumas
I. Kesejahteraan Obyektif Ekonomi						
Total pendapatan	528.499	225.820	65.715	528.620	257.788	61.880
- Aset barang & tabungan	11.755.288	2.006.480	1.327.975	5.068.625	3.428.720	4.026.505
- Pengeluaran makan/hari	155.400	115.200	82.950	148.550	115.500	99.000
- Pengeluaran nonmakan/hari	163.840	75.280	61.310	135.850	85.460	51.500
Nonekonomi						
- Kondisi rumah	32.03	32.72	32.21	34.88	31.76	31.97
- Keorganisasian	22.59	24.17	21.00	20.66	19.73	19.91
- <i>Social gathering</i>	24.99	24.79	22.91	25.75	24.66	23.71
II. Kesejahteraan subjektif (skor)	52.79	52.17	50.19	55.48	51.84	48.66
N	(a) 100	(b) 100	(c) 100	(a) 100	(b) 100	(c) 100
Rasio Gini:	(0,5343)	(0,2832)	(0,9388)	(0,2995)	(0,2423)	(0,88497)

Skor: (1)rumah T = 44 dan R = 11
 (2)Keorganisasian T = 51 dan R = 17
 (3)*Social gathering* T = 30 dan R = 10
 (4)Kesejahteraan subjektif T = 84 dan r = 0
 T = tinggi dan R = rendah
 (a)Nonpertanian
 (b)Kombinasi
 (c)Pertanian

antarpropinsi, terdapat perbedaan, yaitu kekayaan rumah tangga pertanian di Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan kekayaan rumah tangga dalam kegiatan ekonomi kombinasi. Hal ini disebabkan di desa di Jawa Tengah, di samping bekerja sebagai petani penggarap sawah, mereka juga bekerja sebagai peternak, baik itu peternak sapi lokal maupun sapi perah. Hal ini sekaligus memperlihatkan keuntungan mengembangkan peternakan sebagai alternatif kegiatan penduduk pedesaan.

Kaitan antara aset ekonomi dan kesejahteraan berproses sebagai berikut ini. Aset ekonomi adalah potensi *capital* dan dari padanya akan menghasilkan *interest*, makin tinggi *interest* maka pendapatan personal dari pemilik kapital juga tinggi. Dengan demikian, kesejahteraan mereka juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki kapital rendah. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aset ekonomi rumah tangga nonpertanian lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga pertanian.

- Pengeluaran Makan dan Nonmakanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua desa penelitian, baik di DIY maupun Jawa Tengah, kecuali Bangunjiwo, memiliki pengeluaran makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran nonmakanan. Besarnya pengeluaran makanan tersebut dapat dipakai sebagai indikator bahwa penduduk masih berupaya untuk memenuhi kebutuhan utama yakni makanan. Selain itu,

terlihat kurangnya kemampuan masyarakat desa mengalokasikan uangnya untuk keperluan yang lebih produktif.

Kondisi tersebut berlainan dengan Desa Bangunjiwo, pengeluaran untuk nonmakanan (Rp163.780,00 per bulan) lebih tinggi daripada keperluan makan (Rp155.400,00 per bulan). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa semakin sejahtera individu atau masyarakat, maka alokasi penghasilan untuk nonmakanan (barang-barang produktif) lebih tinggi daripada untuk makanan (barang-barang konsumtif).

Hasil pendekatan kesejahteraan ekonomi ternyata didukung oleh hasil analisis kesejahteraan nonekonomi, baik dukungan dari aktivitas dalam organisasi, *social gathering*, maupun kondisi rumah. Untuk lebih jelasnya hal itu dirinci di bawah ini.

1. Kondisi rumah. Kondisi perumahan di Yogyakarta di tiga daerah penelitian memiliki skor yang relatif sama. Di daerah Jawa Tengah, seperti, Bonyokan sebagai desa nonpertanian memiliki skor yang paling tinggi (34,08). Hal ini disebabkan tingkat pendapatan di desa ini lebih tinggi dibandingkan dengan dua desa lainnya di Jawa Tengah, bahkan juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan desa nonpertanian di Yogyakarta.
2. Aktivitas dalam organisasi sosial. Bila variabel organisasi dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan terlihat bahwa organisasi kemasyarakatan bukan monopoli para pekerja nonpertanian, melainkan merata untuk seluruh pekerja atau keluarga yang bekerja, baik pertanian, nonpertanian,

maupun keduanya. Dapat dikatakan bahwa untuk struktur perekonomian di pedesaan, masalah aktivitas dalam organisasi sosial masing-masing memiliki peluang yang relatif sama.

- 3) *Social gathering*. Bila variabel *social gathering* ini dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan, diperoleh hasil yang berbeda dengan peran variabel lain, yakni *social gathering* pada keluarga yang bekerja di nonpertanian dan kombinasi nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian. Ada beberapa penjelasan yang berkaitan dengan fenomena ini. Pertama, penyebab tingginya nilai *social gathering* antara lain tersedianya waktu luang yang dialokasikan untuk kepentingan kerukunan rumah tangga inti. Kedua, sifat dasar keluarga yang bekerja di kedua kegiatan ekonomi tradisional tersebut lebih mempunyai ikatan psikososial. Keluarga petani memiliki sifat pekerjaan yang mandiri dan tidak komunikatif sehingga kemungkinan untuk berkumpul bersama menjadi lebih sedikit.

Secara umum, hasil perhitungan pendekatan objektif nonekonomi mendukung hasil perhitungan pendekatan objektif ekonomi. Akan tetapi, dalam beberapa variabel yang dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat pedesaan, terdapat pola yang berlainan untuk setiap desa.

b. Tingkat Kesejahteraan Subjektif

Indikator ini digunakan untuk mengukur persepsi penduduk

mengenai perkembangan kondisi sosial ekonomi selama tiga tahun terakhir. Jawaban dari pertanyaan yang diajukan adalah (1) tidak tahu, (2) lebih jelek, (3) sama saja, (4) sama baik, dan (5) lebih baik. Prinsip penskoran digunakan dalam penentuan nilai indikator. Artinya, apabila nilai total skor semakin tinggi tergambar bahwa kondisi sosial ekonomi penduduk selama tiga tahun terakhir semakin baik.

Ada kecenderungan bahwa desa nonpertanian mempunyai total skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa kombinasi maupun pertanian. Hal ini sekaligus merupakan bukti bahwa kondisi desa nonpertanian lebih baik dibandingkan dengan pertanian dan kombinasi. Dengan kata lain, ada kesesuaian hasil analisis antara indikator objektif dan subjektif.

c. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Tabel 1 menunjukkan bahwa Bangunjiwo dan Bonyokan memiliki kelebihan dilihat dari sisi kesejahteraan. Akan tetapi, distribusi pendapatan menunjukkan berbagai ketimpangan. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan *Gini Ratio* di setiap desa yakni sebagai berikut. Pertama, untuk desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta masing-masing 0,5343 (Bangunjiwo), 0,2832 (Tamantirto), dan 0,9388 (Patalan). Kedua, desa-desa yang termasuk wilayah Jawa Tengah masing-masing berindeks *Gini Ratio* sebagai berikut: 0,2995 (Bonyokan), 0,2423 (Krajan), dan 0,8497 (Kayumas). Alhasil, dipandang dari sisi distribusi pendapatan, urutannya adalah sebagai berikut: 1)

Krajan, 2) Tamantirto, 3) Bonyokan, 4) Bangunjiwo, 5) Kayumas, dan 6) Patalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di Krajan dan Tamantirto, distribusi pendapatan lebih merata dibandingkan dengan desa-desa lain.

Data menunjukkan bahwa dampak transformasi struktur perekonomian dilihat dari variabel total pendapatan berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi nonpertanian dan kombinasi karena mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan. Akan tetapi, berdampak negatif terhadap sektor pertanian yang dicerminkan oleh rendahnya pendapatan.

Dampak Transformasi Faktor-Faktor Produksi terhadap Kesejahteraan

a. Kesejahteraan dalam Aktivitas Pertanian

Tabel 2 dan Tabel 3 memperlihatkan bahwa baik variabel, pendidikan, umur kepala rumah tangga, dan jumlah anggota rumah tangga merupakan faktor yang mempengaruhi kesejah-

teraan ekonomi dan nonekonomi. Akan tetapi, faktor produksi modal (0.0000) sangat dominan kontribusinya untuk mengembangkan sektor pertanian dan sekaligus terhadap kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Hal ini berbeda bila dilihat dari sisi nonekonomi, yakni variabel pendidikan merupakan faktor yang sangat signifikan (0.0000) untuk meningkatkan kesejahteraan dibandingkan dengan faktor produksi modal (0,0411).

b. Kesejahteraan dalam Kegiatan Ekonomi Kombinasi

Terdapat perbedaan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam sektor kombinasi dibandingkan dengan di pertanian. Di sektor kombinasi, selain dominasi faktor modal (0.0000) juga pemilihan dan penggunaan teknologi (0.0005) sangat penting untuk mengembangkan kedua kegiatan usaha tersebut secara bersamaan dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Akan tetapi, berbeda halnya dengan kesejahteraan nonekonomi,

Tabel 2
Indikator Kesejahteraan Ohjektif (Ekonomi)

Variabel Independen	Pekerjaan		
	Pertanian	Kombinasi	Nonpertanian
	F = 21.8040 sig F = 0.0000 R= 0.30904	F = 17.23005 sig F = 0.0000 R= 0.30751	F = 3.75795 sig F = 0.0029 R= 0.08830
Modal	0.0000	0.0000	0.0193
Pendidikan	0.0205	0.4908	0.0310
Umur	0.0416	0.1729	0.9153
Jumlah ART yang bekerja	0.0404	0.2507	0.1547
Teknologi	-	0.0005	0.0796

Tabel 3
Indikator Kesejahteraan Objektif (Nonekonomi)

Variabel Independen	Pekerjaan		
	Pertanian	Kombinasi	Nonpertanian
	F = 11.0019 sig F = 0.0000 R = 0.18413	F = 2.90902 sig F = 0.0140 R = 0.06975	F = 15.9101 sig F = 0.0000 R = 0.29081
Modal	0.0041	0.6439	0.1079
Pendidikan	0.0000	0.0022	0.0000
Umur	0.6548	0.7324	0.9079
Jumlah ART yang bekerja	0.0767	0.2659	0.2395
Teknologi	-	0.6934	0.4712

karena modal (0.6439) tidak menjadi faktor yang penting, justru pendidikan (0,0022) merupakan faktor yang menentukan untuk mencapai tingkat kesejahteraan (lihat Tabel 2 dan Tabel 3).

c. Kesejahteraan dalam Kegiatan Ekonomi Nonpertanian

Upaya keluarga yang bekerja di sektor nonpertanian untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi memerlukan peran modal, pendidikan, dan teknologi. Tiga faktor ini merupakan unsur utama yang harus diperhatikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat industri. Hal ini mudah dipahami karena tiga faktor itulah yang akan menentukan apakah suatu industri akan berkembang atau tidak. Akan tetapi, untuk kesejahteraan nonekonomi, ternyata variabel pendidikan (0.0000) memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan tampaknya lebih berkaitan dengan bagaimana kemampuan seseorang

mengakomodasi aktivitas di dalam keluarga dan masyarakat.

d. Kesejahteraan Subjektif

Baik dalam masyarakat pertanian maupun nonpertanian, variabel pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan persepsi seseorang terhadap indikator kesejahteraan subjektif. Ada hubungan positif antara pendidikan dengan kesejahteraan subjektif. Hal ini tampaknya berkaitan dengan pemahaman seseorang terhadap kondisi sosial ekonominya dalam kurun waktu tertentu.

Dari analisis tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan variabel kunci yang menjelaskan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Hal itu tidak terbatas pada masyarakat nonpertanian, tetapi juga kombinasi (transisi) dan pertanian. Artinya bahwa intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pendidikan. Meskipun demikian, khusus yang berkaitan dengan usaha

peningkatan kesejahteraan ekonomi perlu diperhatikan faktor modal dan teknologi, khususnya di sektor nonpertanian.

Kelembagaan

Faktor kelembagaan merupakan bagian penting dalam analisis karena aspek kelembagaan merupakan unsur yang strategis dalam memperbesar akses masyarakat ke dalam pasar. Dalam analisis ini akan dibahas aspek kelembagaan dalam pengembangan aktivitas di pedesaan. Analisis sepenuhnya didasarkan pada data kualitatif hasil wawancara mendalam. Ada dua bagian penting yang dibahas, yaitu kasus susu di Jawa Tengah dan tebu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Kasus Susu

Peternak susu di Kayumas sebagian besar mengeluh karena murahnya harga susu yang tidak seimbang dengan biaya dan tenaga perawatan sapi perah. Harga makanan sapi dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, tetapi tidak diikuti dengan kenaikan harga susu. Dalam pemeliharaan sapi, jika tidak dimiliki lahan pertanian, maka semua makanan harus dibeli. Ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa memelihara sapi kredit akan rugi. Untuk menutup kerugian, biasanya, jika sapi beranak, kemudian dijual untuk ongkos pemeliharaan sapi. Salah seorang peternak sapi perah mengungkapkan hal sebagai berikut.

"Kalau dihitung-hitung ndak ada hasilnya to? Bisa-bisa malah kurang. Susu ini pun belum semuanya diterima KUD lho.

Bisa-bisa kalau terlalu encer atau pH-nya kurang KUD ngak mau terima. Kalau sudah begitu, ya, susu kita bawa pulang, kalau tidak diolah menjadi tahu-susu, untuk minum anjing, atau kalau tidak ya kita buang. Ya, memang sering ada orang yang mau beli susu yang rusak itu, tetapi harganya murah sekali. Pernah kok ada kejadian, ya, orang sini menyetorkan susunya tidak pernah diterima KUD, ada saja alasannya. Akhirnya, Bapak itu menyuruh orang lain untuk menyetorkan, eh ternyata diterima, langsung saja susu itu diguyurkan ke wajah petugas KUD tadi."

"Anehnya lagi, kita tahu ya harga beras dan gula di pasar, kalau beli maupun menjual, tetapi untuk susu kita tidak pernah tahu berapa harga jual KUD ke pabrik susu, yang tahu KUD beli susu ke kita itu Rp520,00 per liter."

Gambaran tersebut di atas merupakan indikasi bahwa peternak tidak mampu masuk ke dalam pasar, bukan karena ketidakmampuan masyarakat. Akan tetapi, hal itu semata-mata karena intervensi KUD yang mengatur pembelian dan penjualan susu. Akibat dari situasi tersebut ialah telah terbangun *image* dalam masyarakat mengenai fungsi dan peran KUD.

Banyak masyarakat, baik di desa pertanian, nonpertanian, maupun transisi yang menilai negatif terhadap KUD. Salah satu penduduk di Desa Kayumas mengatakan sebagai berikut.

"KUD yang seharusnya menolong, namun ternyata lebih bersifat menjerat rakyat. Rakyat banyak hutang ke KUD. Sapi itu sudah berproduksi atau belum harus membayar kredit dan bunga ke KUD padahal kreditnya berbunga terus. Jadi, hidup tidak bisa tenang."

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa antara konsep ideal bantuan sapi perah melalui kredit dengan implementasi di lapangan terdapat *gap* yang sangat jauh. Keberadaan sapi Banpres pada dasarnya merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan ekonomi penduduk melalui diversifikasi atau pengalihan usaha. Hal ini akan mempermudah masyarakat untuk masuk ke dalam transformasi ekonomi yang sedang berlangsung. Akan tetapi, KUD sebagai lembaga yang mempunyai tanggung jawab, justru menyebabkan peternak masuk ke dalam *trap* yang sangat dilematis. Di satu pihak usaha sapi perah tersebut tidak menguntungkan, tetapi di pihak lain aktivitas tersebut tidak dapat dihentikan karena penduduk masih menanggung kredit untuk melunasinya.

Kondisi semacam ini bermuara pada dua kemungkinan. Pertama, KUD sebagai institusi tidak mampu membantu masyarakat untuk memperoleh akses terhadap pasar karena institusi tersebut tidak *capable*. Kedua, ketidakmampuan tersebut sebenarnya hanya merupakan persoalan personal yang ada di dalam KUD.

b. Kasus Tebu

Salah satu kasus lain, masih dalam sektor pertanian (di Daerah Istimewa Yogyakarta) yang diilustrasikan di bawah ini merupakan gambaran lain bagaimana sebuah kebijaksanaan yang bertujuan baik, justru pada akhirnya merugikan petani.

"Sawah yang kami beli itu merupakan sumber penghasilan kami, namun kami kecewa kenapa pemerintah justru menyengsarakan rakyat. Bila sawah ditanami tebu, kita itu tidak bisa hidup".

Lebih lanjut diungkapkan bahwa untuk luas tanah 100 lobang, bila ditanami padi (4 bulan) dapat menghasilkan uang kurang lebih Rp140.000,00 (harga jual beras Rp700,00 per kilogram), sedangkan untuk tanaman tebu (masa tanam 4 kali masa tanam padi) petani hanya memperoleh uang tunggu sebesar Rp300,00 per lobang. Uang tunggu ini berstatus pinjaman, artinya kepada petani diberikan pinjaman dulu oleh KUD sebesar Rp300,00 per lobang. Apabila petani mempunyai 100 lobang, maksimal dia hanya boleh pinjam uang sebesar Rp30.000,00 untuk waktu sekitar 14 bulan. Pada waktu panen petani harus mencocokkan hutangnya dengan hasil panen. Biasanya ketika panen, petani memperoleh Rp700,00 per lobang ditambah 1 ons gula pasir (kurang lebih seharga Rp150,00) per lobang. Maka dari itu, untuk sawah seluas 100 lobang diperoleh uang sejumlah Rp70.000,00 ditambah

Rp15.000,00 untuk waktu 14 bulan (4 kali masa panen). Apabila petani mengambil jatah uang tunggu, uang yang diterima petani pada waktu rambang tinggal Rp60.000,00.

Ada keluhan bahwa sewa tanah cenderung murah dan lama. Penduduk tidak berani menolak karena penolakan tersebut akan mempunyai dampak yang tidak menguntungkan, paling tidak akan diinterogasi secara maraton. Oleh karena itu, walaupun merugi banyak, mereka tetap menurut pada KUD untuk menanam sawah dengan tebu.

Permasalahan program TRI di Yogyakarta tidak jauh berbeda dengan di Jawa Tengah. Kecamatan Jatinom merupakan salah satu kecamatan uji coba penanaman tebu. Salah seorang penduduk mengemukakan hal berikut ini.

"Kakak saya itu kan bodoh, dia mau saja tanah bengkoknya digunakan untuk ditanami tebu. Teman saya saja yang tanahnya ditanami tebu itu rugi besar kok. Soalnya kan begini, pengurus KUD itu tidak jujur. Semua kegiatan penanaman tebu semua dikoordinasi KUD, mulai dari tanam sampai tebang. Kita hanya manut saja. Jika KUD menghendaki tanaman itu dipupuk, kita tinggal mencari orang untuk memupuk, pupuk sudah disediakan oleh KUD. Jika tebu sudah tua, namun KUD belum mengizinkan untuk menebang, kita ya belum berani nebang, sampai-sampai ada petani yang membakar tebunya sendiri biar KUD langsung

memerintah untuk menebang. Demikian juga dengan penjualan, KUD yang menjual ke pabrik tebu. Pokoknya kita tahunya beres, KUD tinggal memberikan sisa uang setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, dan perawatan. Kalau pengurus KUD itu jujur Mas, kita percaya saja, tetapi kalau tidak kita akan rugi. Kalau kita tanami dengan tanaman lain, untungnya lebih besar. Ketika panen tebu kedua, semua kegiatan kita yang mengusahakan, eh ternyata hasilnya jauh lebih banyak lho."

Dua kasus tersebut memberikan ilustrasi persoalan peningkatan kesejahteraan. Penduduk pedesaan harus berhadapan dengan suatu mekanisme yang justru menghambat usaha tersebut. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari dua kasus tersebut. Pertama, penduduk tidak mempunyai akses terhadap informasi pasar. Hal itu ditunjukkan oleh intervensi KUD dalam menentukan harga jual dari penduduk dan harga jual dari KUD. Kedua, akibatnya penduduk tidak mampu mengikuti mekanisme pasar yang berlaku. Ketiga, pemaksaan terhadap keputusan rasional petani, kasus tebu, misalnya, membuat petani tidak mempunyai pilihan. Akibat akhir dari hal ini adalah kondisi di sektor pertanian yang kurang menguntungkan secara ekonomi akan semakin tertekan, justru karena adanya institusi yang sebenarnya diharapkan berfungsi sebagai penolong petani.

Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Secara umum, hasil penelitian ini memberikan konfirmasi terhadap asumsi yang telah diterima secara umum, yaitu bahwa sektor pertanian cenderung inferior terhadap sektor nonpertanian. Ada hubungan antara proses transformasi yang digambarkan dari pola aktivitas pekerjaan dari pertanian ke kombinasi dan non-pertanian dengan tingkat kesejahteraan. Bahkan, dari aspek kesejahteraan ekonomi, perbedaan antarsektor ini sangat mencolok. Contohnya, di Daerah Istimewa Yogyakarta pendapatan di sektor pertanian delapan kali lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan di sektor nonpertanian. Hal itu secara implisit juga merupakan gambaran bahwa proses transformasi ekonomi sangat diperlukan di pedesaan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Akan tetapi, terdapat hasil yang menarik bahwa pemerataan pendapatan di sektor pertanian lebih buruk dibandingkan dengan di sektor nonpertanian. Hal ini disebabkan selain harga jual produk tidak menguntungkan, juga ada pihak luar turut serta atas kebijakan pola tanam, seperti kebijakan TRI mendorong biaya marginal lebih besar daripada *marginal revenue*. Akibatnya, ketimpangan distribusi pendapatan di kedua kegiatan usaha ini makin melebar. Apabila kendala tersebut dibenahi, transformasi dari sektor pertanian dan nonpertanian akan berjalan mulus sebab selain dapat meningkatkan

penghasilan juga akan lebih memmeratakan pendapatan.

Dampak transformasi dirasakan positif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di pedesaan. Apabila dibandingkan antara nilai kesejahteraan di kegiatan usaha pertanian dan nonpertanian, baik dari segi kesejahteraan objektif maupun subjektif, kegiatan nonpertanian lebih nyata mendorong terciptanya kesejahteraan yang lebih baik. Sementara itu, di dalam sektor pertanian sendiri, peluang yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah jenis pertanian yang tidak hanya mengandalkan pada pertanian sawah yang bersifat tradisional, tetapi perlu dikembangkan usaha pertanian lain dan jika memungkinkan dengan usaha peternakan. Dalam hal ini, peran kelembagaan sangat diperlukan, terutama untuk memperbesar akses petani ke dalam pasar. Hal ini didasarkan pada temuan yang menunjukkan bahwa peran serta institusi seringkali justru memperlemah posisi petani.

Hasil lain yang cukup menarik adalah bahwa variabel pendidikan secara konsisten berhubungan atau mempunyai kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya, setiap intervensi pemerintah dalam meningkatkan pendidikan penduduk secara langsung merupakan usaha yang akan mempunyai dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk sektor pertanian, faktor modal dan pendidikan juga merupakan dua variabel yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian, industri pedesaan akan lebih menguntungkan bagi masyarakat jika mereka mempunyai akses yang cukup terhadap modal dan teknologi. Untuk itu, peran lembaga keuangan untuk menyederhanakan prosedur kredit bagi masyarakat pedesaan merupakan langkah sangat strategis. Dari sisi teknologi, pemerintah dapat mempercepat difusi inovasi di bidang teknologi, baik melalui pelatihan maupun introduksi teknologi yang terkait dengan jenis industri yang berkembang di pedesaan.

Penelitian ini sekaligus menyokong pemilihan industrialisasi sebagai strategi pembangunan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa hal itu tidak harus dilakukan dengan meninggalkan sektor pertanian. Perhatian terhadap sektor pertanian menjadi urgen karena pada dasarnya masih terdapat cukup besar penduduk yang tergantung pada sektor tersebut. Sebagaimana telah disebutkan di atas, pengembangan sektor pertanian perlu diarahkan untuk terjadinya diversifikasi pertanian. Di samping itu, keterkaitannya dengan sektor nonpertanian merupakan hal yang juga perlu digunakan sebagai landasan

berpikir dalam mengembangkan sektor pertanian.

b. Rekomendasi

1. Kebijakan pola tanam tebu (TRI) perlu diubah, antara lain TRI sebaiknya dilaliskan dengan cara membuka lahan baru di luar Jawa.
2. Selain mengembangkan produk pertanian, kegiatan usaha peternakan merupakan kegiatan usaha yang perlu dikembangkan untuk peningkatan penghasilan petani di pedesaan.
3. Peran KUD yang selama ini menjadi ujung tombak kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi rakyat di pedesaan agar kembali kepada proporsi yang sudah disepakati bersama. Apabila dimungkinkan, dibentuk lembaga khusus yang menangani masalah industri kecil di pedesaan.
4. Program pendidikan sembilan tahun perlu segera dilaksanakan di pedesaan sebab ini sangat penting untuk menggeser pola konsumtif ke pola pikir rasional sebagai persiapan menyongsong era globalisasi.

Referensi

Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Biro Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja. 1996. *Kajian ekonomi rakyat: agenda penelitian T.A 1996/1997*. Jakarta.

Kasto dan Henry Sembiring. 1996. *Profil penduduk Indonesia*. Yogyakarta:

Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.

Kuznets, Simon. 1955. "Profil kemiskinan di Nusa Tenggara Timur: analisis rumah tangga berdasarkan Susenas 1993". *Prisma* 24(10): 37-54.